

# FAKTOR DETERMINASI FUNGSI INTERMEDIASI PERBANKAN SYARIAH DI INDONESIA

<sup>1</sup>Eva Eflinda, <sup>2</sup>Prihantoro

<sup>1,2</sup>Jetisharjo JT II/457 RT 27 RW 06  
Kel. Cokrodiningratan, Kec. Jetis, DI Yogyakarta  
<sup>1</sup>[evaeflinda@yahoo.com](mailto:evaeflinda@yahoo.com)

## ABSTRAK

Kondisi pertumbuhan ekonomi nasional belum berdampak signifikan terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu indikasinya dapat dilihat dari masih tingginya tingkat pengangguran terbuka tahun 2009 yang lalu. Hal ini terjadi karena keluhan pelaku bisnis yang merasakan sulitnya memperoleh suntikan modal dari perbankan sebagai sumber penting untuk peningkatan kapasitas produksi mereka. Sehingga fungsi intermediasi perbankan Indonesia masih perlu dipertanyakan. Khusus di perbankan syariah, keberperanan fungsi intermediasi dapat dilihat dari indikator *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. FDR perbankan syariah tahun 2009 menunjukkan penurunan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan adanya kesenjangan yang semakin jauh antara dana yang terkumpul dengan dana yang disalurkan melalui pembiayaan pada perbankan syariah. Sehingga dimungkinkan untuk membuat suatu penelitian mengenai analisa faktor-faktor apa yang dapat mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan khususnya perbankan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi fungsi intermediasi perbankan syariah di Indonesia. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah model "distributed-lag model". Dalam model ini analisa yang dilakukan adalah analisa regresi linier berganda, korelasi berganda, perhitungan nilai koefisien determinasi, dan uji hipotesis dengan T-test dan F-test. Kesimpulan adanya hubungan yang cukup signifikan antara NPF, SBIS, PDB dan IHSG secara bersama-sama terhadap FDR. Secara parsial, NPF memiliki hubungan yang cukup signifikan positif dengan FDR, sementara itu SBIS dan IHSG memiliki hubungan yang cukup signifikan negatif dengan FDR, dan untuk PDB tidak ada hubungan yang cukup signifikan dengan FDR. Dari beberapa variabel yang memiliki hubungan dengan FDR, ternyata IHSG dengan tingkat signifikan 0,905 atau 90,5%.

**Kata kunci:** FDR, NPF, SBIS, PDB dan IHSG

## ABSTRACT

The condition of national economic growth has not had a significant impact on improving the community economy. One of the indications can be seen from the high level of open unemployment in 2009. This happened because of complaints from businessmen who felt the difficulty to obtain capital injection from bank as an important source for increasing their production capacity. So that, the intermediation function of Indonesian banking still needs to be questioned. Especially in syariah banking, the role of intermediation function can be seen from the *Financing to Deposit Ratio (FDR)* indicator. FDR of syariah banking in 2009 showed a degradation from previous years. It indicates a further gap between collected and channeled funds through financing in syariah banking. So it is possible to make a study about the analysis of factors that can affect the banking intermediation function, especially syariah banking. This study aims to identify the factors that influence the intermediation function of syariah banking in Indonesia. The analytical tool used in this study is the "distributed-lag model" model. In

*this model the analysis carried out multiple linear regression analysis, multiple correlation, calculation of determination coefficient value, and hypothesis check with T-test and F-test. The conclusion is about the existence of a significant relationship between NPF, SBIS, GDP and CSPI in cooperation with FDR. Partially, NPF has a significantly positive relationship with FDR, meanwhile SBIS and IHSG have a significantly negative relationship with FDR, and for GDP there is no significant relationship with FDR. From several variables that have a correlation with FDR, it turns out IHSG with a significant level of 0.905 or 90.5%.*

**Keywords:** FDR, NPF, SBIS, GDP and CSPI

## **PENDAHULUAN**

Sulitnya mengurangi tingkat pengangguran atau menciptakan lapangan kerja baru merupakan cermin dari lambatnya gerak laju ekspansi usaha. Fenomena yang dijumpai adalah dimana para pelaku bisnis masih banyak mengeluhkan sulitnya memperoleh suntikan modal dari perbankan sebagai sumber dana penting untuk meningkatkan kapasitas produksi mereka. Sehingga fungsi intermediasi perbankan Indonesia masih perlu dipertanyakan. Khusus di perbankan syariah, fungsi intermediasi juga masih belum optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu indikator yang memperlihatkan berperan atau tidaknya fungsi intermediasi perbankan syariah yaitu FDR (*Financing to Deposit Ratio*). FDR merupakan rasio pembiayaan yang disalurkan kepada debitur terhadap dana yang diterima oleh bank syariah. Tahun 2009, nisbah antara pembiayaan dan dana masyarakat yang dihimpun bank syariah menunjukkan penurunan yang cukup tajam. FDR tahun 2009 adalah sebesar 89,7 persen jauh dari FDR tahun 2008 yang mencapai angka 104,64 persen. Lebih lanjut lagi, dari

jumlah pembiayaan yang ada porsi pembiayaan *murabahah* yang bersifat konsumtif lebih tinggi yaitu 56,8 persen dari pada pembiayaan *mudharabah* atau *musyarakah* yang bersifat pembiayaan modal kerja sebagai sumber pendapatan utama perbankan syariah.

Melihat kondisi tersebut, dimana perbankan umumnya dan perbankan syariah khususnya yang seharusnya menjadi media intermediasi antara pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana bagi kelangsungan kehidupan ekonomi masyarakat suatu negara, ternyata belum dapat dirasakan oleh masyarakat umumnya. Sehubungan dengan itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap faktor-faktor apa saja yang dapat berpengaruh terhadap fungsi intermediasi perbankan syariah.

## **KERANGKA TEORI**

### **Ruang Lingkup Kegiatan**

#### **Operasional Bank Syariah**

Ditinjau dari fungsinya, terdapat beberapa definisi tentang bank antara lain adalah bahwa bank adalah industri jasa

yang berfungsi sebagai mediator dari pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Berdasarkan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dinyatakan bahwa bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya bank syariah dapat didefinisikan sebagai bank yang melaksanakan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pasal 1 ayat 13 adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah.

Adapun untuk operasional, bank syariah dapat mengembangkan berbagai macam produk yang sesuai dengan prinsip syariah. Secara garis besar pengembangan produk bank syariah dapat dikelompokkan dalam tiga kelompok, yaitu:

#### 1. Produk Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana di bank syariah dapat dilakukan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Dalam pengembangannya, produk penghimpunan dana dapat

dikembangkan dengan 2 (dua) prinsip, yaitu prinsip *wadi'ah*, dan prinsip *mudharabah*.

#### 2. Produk Penyaluran Dana

Secara garis besar, produk-produk yang dikembangkan dalam menyalurkan dana yang terhimpun dapat dikelompokkan ke dalam empat kategori berdasarkan tujuan penggunaannya, yaitu (1) pembiayaan dengan prinsip jual beli, (2) pembiayaan dengan prinsip sewa, (3) pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan (4) pembiayaan dengan akad pelengkap.

#### 3. Produk Jasa

Bank dapat melakukan berbagai pelayanan jasa perbankan kepada nasabah dengan mendapat imbalan berupa sewa atau keuntungan. Jasa perbankan tersebut antara lain berupa *sharf* (jual beli valuta asing) dan *ijarah* (sewa) dalam bentuk penyewaan kotak simpanan (*safe deposit box*) dan jasa tata laksana administrasi dokumen (*custodian*).

Dari berbagai jenis kegiatan yang dapat dilakukan oleh bank tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa kegiatan bank syariah tidak hanya meliputi penghimpunan dana dan penyaluran dalam bentuk pembiayaan, tetapi memiliki lingkup kegiatan yang lebih luas. Namun kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan merupakan kegiatan bank yang utama berkaitan dengan fungsi bank sebagai media intermediasi. Fungsi intermediasi inilah yang akan

berpengaruh terhadap peningkatan taraf hidup masyarakat banyak.

### **Ukuran Fungsi Intermediasi Perbankan Syariah**

Ukuran fungsi intermediasi perbankan dalam penilaian kesehatan perbankan dari Bank Sentral tidak diatur dengan tegas. Yang diatur secara tegas adalah ketentuan Batas Maksimum Pemberian Kredit/Pembiayaan (BMPK) atau *Legal Lending Limit*. Ketentuan BMPK dimaksudkan adalah untuk mengendalikan risiko pemberian kredit kepada debitur tertentu baik kepada nasabah perorangan maupun badan hokum atau kepada pemegang saham bank tersebut. Ukuran yang digunakan adalah maksimum kredit yang dapat diberikan dikaitkan dengan modal yang dimiliki bank tersebut. Adapun besarnya proporsi aset bank yang harus terdiri dari pinjaman atau beberapa rasio pinjaman yang disalurkan terhadap dana yang dihimpun suatu bank, merupakan bagian dari *asset and liability management* suatu bank.

Optimalisasi *return of assets* dan risiko pembiayaan bermasalah, risiko likuiditas dan risiko lainnya tentu akan menjadi pertimbangan. Edward W. Reed dan Edward K. Gill (1989) dalam bukunya *Commercial Bank* menyatakan bahwa tidak ada jawaban pasti tentang besar maksimal portofolio pinjaman. Berapa besar proporsi aset bank yang harus terdiri dari pinjaman

atau pembiayaan dalam bank syariah adalah suatu persoalan kebijakan bank secara keseluruhan dan selanjutnya merupakan dasar penentuan dalam kebijakan pembiayaan. Karena pinjaman biasanya merupakan aset yang paling menguntungkan yang dimiliki oleh suatu bank.

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Intermediasi Bank**

Pemberian pinjaman merupakan kegiatan bank yang sangat menentukan dalam fungsi intermediasinya. Namun karena pemberian pinjaman mempunyai peran penting, baik bagi bank maupun masyarakat, maka kebijakan penjaminan harus dibuat dengan cermat. Pada umumnya menurut Edward W. dan Edward K. (1989) bahwa faktor yang disebut dibawah ini juga menentukan besar dari komposisi cadangan sekunder dan rekening investasi sebuah bank. Faktor-faktor yang paling menentukan menurut mereka adalah: (a) Posisi Modal, (b) Risiko dan Laba, (c) Stabilitas Ekonomi, (d) Pengaruh Kebijakan Moneter dan Fiskal, (e) SDM Bank yang Profesional, dan (f) Kebutuhan Kredit Setempat. Dari sisi bank syariah, faktor-faktor penentu dalam fungsi intermediasi tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

#### **a. Posisi Modal**

Modal bank bertindak sebagai penyangga untuk melindungi tabungan penabung. Besarnya modal dalam

kaitannya dengan deposit mempengaruhi resiko yang dapat dipikul oleh sebuah bank. Bank yang memiliki struktur modal yang lebih besar dapat memberikan pinjaman dengan jatuh tempo yang lebih lama dan resiko kredit yang lebih besar.

b. Risiko dan Laba

Untuk kegiatan yang lebih berhasil bagi sebuah bank, selama bank mempertimbangkan faktor penting ini dalam merumuskan kebijakan pembiayaan. Sebagian bank mungkin memberikan tekanan lebih kepada pendapatan dibandingkan dengan bank lainnya. Bank yang memiliki kebutuhan laba yang lebih besar, dalam melaksanakan kebijakan pembiayaan lebih agresif dibandingkan dengan bank yang tidak menganggap laba sangat penting. Kebijakan yang agresif mungkin mengharuskan pemberian pembiayaan yang lebih besar pada produk *murabahah*, yang biasanya memberikan margin keuntungan yang lebih tinggi dengan resiko yang lebih rendah dibandingkan dengan pembiayaan modal kerja berupa produk *musyarakah* ataupun *mudharabah*.

c. Stabilitas Deposit

Naik turun dan jenis deposit harus dipertimbangkan oleh sebuah bank dalam meneruskan kebijakan pinjamannya. Setelah menetapkan cadangan yang cukup untuk cadangan primer dan sekunder bank, selanjutnya dapat

memberikan pembiayaan. Walaupun kedua cadangan dimaksudkan untuk menjaga fluktuasi deposit yang dapat diperkirakan serta naik turunnya rekening karena kebutuhan yang tak terduga mengharuskan bank untuk mempertimbangkan stabilitas deposit dalam merumuskan kebijakan pembiayaan.

d. Kondisi Ekonomi

Kondisi ekonomi daerah yang dilayani oleh bank sangat berpengaruh dalam menentukan kebijakan pembiayaan suatu perekonomian yang stabil dan lebih mendukung kebijakan pinjaman yang lebih longgar dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang mengalami perubahan musim dan siklus. Kondisi ekonomi yang penuh ketidakpastian mengandung risiko pembiayaan bermasalah yang lebih besar dibandingkan dengan kondisi ekonomi yang stabil. Perhatian harus diberikan pada perekonomian nasional. Kondisi para modal yang stabil dan dinamis juga merupakan alternatif bagi investasi maupun penerima pembiayaan.

e. Kebijakan Moneter dan Fiskal

Kemampuan bank memerikan pembiayaan dipengaruhi oleh kebijakan moneter dan fiskal. Jika kebijakan moneter dan fiskal bersifat ekspansi dan cadangan tambahan diberikan pada sistem perbankan komersial, kemampuan bank untuk memberikan pinjaman akan

meningkat. Dalam keadaan seperti ini bank dapat membuat kebijakan pinjaman yang lebih longgar daripada kalau keadaan sebaliknya. Penurunan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) sudah semestinya menurunkan suku bunga pinjaman bank konvensional, dan terhadap bank syariah penurunan suku bunga ini akan berdampak pada debiturnya yang mungkin akan lari untuk mendapatkan dana dari bank konvensional. Demikian pula dengan penerapan pajak pada simpanan bank dan transaksi di pasar modal.

#### f. Profesionalitas Sumber Daya Manusia Bank

Profesionalitas sumber daya manusia berperan penting dalam pembuatan kebijakan pembiayaan. Pejabat bank yang memiliki kemampuan dan berpengalaman yang banyak di bidang pembiayaan akan memberikan keputusan yang cepat dan tepat dalam pemberian pembiayaan. SDM bank yang profesional juga akan menjamin layanan pemberian pembiayaan yang cepat dan tidak bertele-tele.

#### g. Kebutuhan akan Pembiayaan di Daerah Setempat

Alasan utama pembentukan bank atau pembukaan jaringan suatu adalah untuk melayani masyarakat setempat dan sekitarnya. Jika ini tidak dilakukan, maka tidak ada atau sedikit sekali alasan untuk membenarkan kehadirannya. Bank secara

moral terlibat untuk memberikan pembiayaan kepada masyarakat yang mengajukan permohonan pinjaman yang sehat dan logis secara ekonomis.

### **Penelitian Sebelumnya**

Rusmiyati, penelitian ini dilatarbelakangi oleh kecenderungan melambatnya laju pertumbuhan kredit karena belum pulihnya fungsi intermediasi perbankan akibat krisis yang melanda Indonesia tahun 1997, akibatnya perbankan enggan untuk menyalurkan kredit ke sektor industri dalam jumlah besar karena risiko yang tinggi. Kondisi ini menyebabkan investasi dan konsumsi tertekan sehingga akan mempengaruhi output nasional atau yang dikenal dengan produk domestik bruto. Adapun beberapa masalah yang dirumuskan dalam penelitian tersebut adalah menganalisa faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi kredit dari jalur pinjaman, dan bagaimana pengaruh kredit tersebut terhadap output nasional. Dan hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kredit dipengaruhi oleh suku bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia), DPK (Dana Pihak Ketiga), capital per asset, dan *lag variable* dependen. Variabel NPL (*Non Performing Loan*) yang dimasukkan dalam penelitian ini ternyata tidak signifikan berpengaruh pada tingkat sepuluh persen. Persamaan output nasional (PDB) dipengaruhi oleh dummy kebijakan ekspansif, dummy pemilu dan dummy

krisis tahun 1998. Sedangkan variabel kredit tidak berpengaruh terhadap PDB karena kebijakan kredit belum mampu mempengaruhi kredit secara optimal karena belum pulihnya fungsi perbankan sebagai *financial intermediation*.

Lukman Hakim Hassan (2004) melihat Perbandingan Peranan Jalur Kredit pada Masa Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi menggunakan model ketidakseimbangan kredit dan model VAR (*Vector Autoregression*). Model ketidakseimbangan kredit diestimasi dengan menggunakan fungsi *likelihood* dan metode *maximum likelihood*. Model ini terdiri dari model permintaan dan penawaran kredit. Model VAR dalam penelitian ini digunakan untuk melihat pengaruh jalur kredit dan M2 terhadap output. Dari penelitian ini didapati bahwa sebagian dari hasil estimasi yang dilakukan tidak sesuai dengan teori. Pada persamaan penawaran dan permintaan kredit variable yang sangat berpengaruh adalah suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dan Gross Domestic Produk (GDP).

Abdullah dan Suseno (2003) bahwa perbankan di daerah tidak menjalankan fungsi sebagai lembaga intermediasi dimana penyaluran kredit jauh lebih kecil dibandingkan dengan penyerapan dananya. Hal ini tercermin dari *Loan to Deposit Ratio* (LDR) perbankan di daerah yang sangat kecil. Kewenangan kantor cabang secara signifikan mempengaruhi nilai kredit

yang disalurkan oleh kantor cabang bank. Meskipun perindividual kredit multiguna umumnya bernilai nominal relatif kecil, namun total proposal yang diajukan jauh lebih besar dibandingkan dengan jenis kredit lainnya. Sehingga dengan demikian secara keseluruhan jenis kredit ini memiliki nilai nominal besar dan sekaligus menegaskan bahwa kewenangan kantor cabang bank sangat mempengaruhi total penyaluran kredit di daerah. Rahman (2003) bahwa intermediasi perbankan melalui LDR dipengaruhi oleh NPL, SBI, IHSG dan PDB. Jadi dari paparan penelitian sebelumnya dapat ditarik suatu premis bahwa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi fungsi intermediasi bank syariah yang tercermin dalam *Financing to deposit ratio*, yaitu:

- a. *Non Performing Financing* (NPF)
- b. Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)
- c. *Product Domestic Bruto* (PDB)
- d. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

## **METODE PENELITIAN**

### **Sampel Penelitian dan Data**

Obyek penelitian dalam tesis ini adalah perusahaan-perusahaan yang bergerak di industri perbankan syariah dan beroperasi di Indonesia. Menurut data dari Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan Bank Indonesia, jumlah Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah

yang beroperasi dari tahun 2005 sampai dengan 2009 adalah sebanyak 6 Bank Umum Syariah dan 25 Unit Usaha Syariah, sehingga berjumlah 31 Bank Syariah. Adapun jumlah populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah sama yaitu sebanyak 31 bank syariah yang diambil secara acak “*non probability random sampling*”, dengan menguji semua anggota populasi sebagai anggota sampel dalam penelitian. Hal ini disebabkan karena setiap anggota sampel memiliki peluang yang sama untuk diuji. Dalam pengambilan sampel seperti ini juga dikenal dengan “*non purposive sampling*”.

Penelitian menggunakan sumber data sekunder yang secara spesifik mengacu pada data yang terdapat pada Statistik Ekonomi Keuangan yang diterbitkan oleh Direktorat Statistik Ekonomi dan Moneter – Kantor Pusat Bank Indonesia. Data yang akan dianalisa adalah data variabel-variabel ekonomi yang mempengaruhi fluktuasi *financing to deposit ratio* selama 5 (lima) tahun, yaitu dari tahun 2005 sampai dengan 2009.

### **Desain Penelitian dan Metode Analisis**

Desain penelitian ini menerapkan kombinasi yang bertipe deskriptif atau *descriptive research* dan sebab akibat atau *causal research* (Wibisono, 2003:21). Penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian deskriptif karena riset ini mempunyai tujuan utama untuk

menggambarkan karakteristik sebuah populasi atau fenomena yang sedang terjadi. Disamping itu juga termasuk dalam kategori penelitian sebab akibat karena dalam salah satu analisisnya berusaha untuk mengidentifikasi hubungan sebab akibat antara berbagai variabel.

Penelitian ini menggunakan model analisis regresi linier berganda (*multiple regression model*) dan data yang digunakan adalah penggabungan data antara data yang bersifat “*time series*” dengan yang bersifat “*cross-section*” atau yang dikenal dengan metode “*pooling*”. Selanjutnya dalam analisis data ini, digunakan metode analisis “*time series*” yang mengukur secara rata-rata pengaruh yang ditimbulkan dari masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara berurutan dari faktor periode (waktu), sehingga perlu adanya pengukuran secara berurutan antara-masing-masing variabel independen dengan variabel dependen, dimana periode yang telah lampau sangat berpengaruh sekali secara bersama-sama dan parsial terhadap periode yang akan datang. Adapun analisis ini dikenal dengan nama “*auto-regressive*” model atau dikenal juga dengan analisis “*distributed-lag model*” (Gujarat:1995). Persamaan umum regresi linier berganda adalah:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4$$

Dimana:

$Y = \textit{Financing to Deposit Ratio}$  sebagai

a = Konstanta

$b_1$  = Koefisien Regresi dari *Non Performing Finance*

$X_1$  = *Non Performing Finance* sebagai

$b_2$  = Koefisien Regresi dari Imbalan SBIS

$X_2$  = Imbalan SBIS sebagai

$b_3$  = Koefisien Regresi dari Produk Domestik Bruto

$X_3$  = Produk Domestik Bruto

$b_4$  = Koefisien Regresi dari IHSG

$X_4$  = IHSG sebagai Variabel

## Deskripsi Variabel

### *Financing to Deposit Ratio (FDR)*

FDR menggambarkan seberapa besar jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan oleh bank syariah kepada masyarakat melalui pembiayaan. Variabel ini merupakan salah satu indikator untuk mengetahui seberapa besar fungsi intermediasi dapat terlaksana di perbankan syariah. Tabel 1 perkembangan FDR Perbankan Syariah secara kuartalan selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

**Tabel 1. Perkembangan Financing to Deposit Ratio**

Periode/ Tahun	2005	2006	2007	2008	2009
Q1	106%	107%	95%	100%	103%
Q2	107%	111%	101%	103%	100%
Q3	110%	109%	106%	103%	98%
Q4	98%	99%	100%	103%	90%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Table 1 dapat diketahui bahwa rasio pembiayaan terhadap dana pihak ketiga di perbankan syariah mengalami fluktuasi naik turun. Awal periode 2005 dapat dilihat bahwa FDR bank syariah mengalami kenaikan yang cukup signifikan, hal ini berlanjut sampai dengan pertengahan tahun 2007. Pada pertengahan tahun 2007 sampai dengan periode akhir tahun 2009, FDR perbankan syariah menunjukkan penurunan dari periode ke periode.

### Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS)

SBIS merupakan surat berharga yang dikeluarkan Bank Indonesia berdasarkan

prinsip syariah yaitu dengan akad *ju'alah* yang diterbitkan melalui mekanisme lelang. SBIS diterbitkan guna penyediaan instrumen pasar terbuka untuk mengendalikan moneter dengan prinsip syariah. Untuk mendapatkan SBIS, bank syariah harus memenuhi FDR. SBIS mulai diberlakukan sejak bulan Maret 2008, sebelumnya instrumen yang digunakan adalah Sertifikat Wadiah Bank Indonesia (SWBI). Berikut ini disajikan data-data SBIS dan SWBI dalam kurun waktu 2005 sampai dengan 2009.

**Tabel 2. Perkembangan Sertifikat Bank Indonesia Syariah**

Periode/ Tahun	2005	2006	2007	2008	2009
Q1	487	1.148	3.325	2.839	3.251
Q2	538	1.188	2.036	2.042	3.003
Q3	507	1.046	1.311	413	3.095
Q4	2.395	2.357	2.599	2.824	4.341

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Tabel 2 terlihat bahwa dari tahun 2005 sampai dengan 2009 nilai SBIS secara rata-rata mengalami kenaikan terutama pada kuartal keempat setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa peran Bank Indonesia dalam rangka menstabilkan moneter dengan instrument SBIS terhadap uang beredar cukup tinggi, sehingga secara proporsional dapat menekan laju inflasi.

#### ***Non Performing Financing (NPF)***

NPF merupakan nilai pembiayaan yang tidak lancar yang secara terjadi akibat ketidakstabilan ekonomi. Berikut ini data jumlah NPF bank syariah di Indonesia selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009 secara kuartal.

**Tabel 3. Perkembangan Non Performing Financing Bank Syariah  
(dalam milyar rupiah)**

Periode/ Tahun	2005	2006	2007	2008	2009
Q1	359,14	683,63	1.193,86	1.237,00	2.019,00
Q2	549,13	767,54	1.423,36	1.442,00	1.851,00
Q3	696,41	1.007,87	1.633,34	1.554,00	2.547,00
Q4	429,11	971,22	1.131,20	1.509,00	1.882,00

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Tabel 3 menunjukka nilai pembiayaan tidak lancar (NPF) bank syariah dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Hal ini terjadi karena faktor inflasi yang berpengaruh terhadap tingkat pengembalian pembiayaan yang disalurkan oleh perbankan syariah.

#### **Produk Domestik Bruto (PDB)**

PDB merupakan jumlah produk dan jasa yang dihasilkan oleh suatu negara tanpa memisahkan produk yang dihasilkan dalam negeri atau luar negeri. Berikut data perkembangan PDB Indonesia selama kurun waktu 2005 sampai dengan 2009.

**Tabel 4. Perkembangan Produk Domestik Bruto  
(dalam milyar rupiah)**

Periode/ Tahun	2005	2006	2007	2008	2009
Q1	426.612	448.485	475.642	469.642	527.710
Q2	436.121	457.637	488.421	519.359	540.353
Q3	448.598	474.904	506.833	538.567	561.265
Q4	439.484	466.101	493.332	518.935	547.543

Sumber: Statistik Perbankan Syariah Bank Indonesia

Tabel 4 diatas dapat diketahui bahwa PDB Indonesia selama 2005 sampai dengan tahun 2009 menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa perekonomian Indonesia semakin membaik. Namun apabila dianalisa dengan SBIS dan NPF yang juga meningkat, dapat disimpulkan bawa tidak adanya hubungan yang cukup kuat secara signifikan terhadap indicator SBIS dan NPF, karena seharusnya bila terjadi peningkatan risiko pembiayaan perbankan syariah dengan tingkat inflasi

yang tinggi maka akan terjadi penurunan yang cukup signifikan terhadap pertumbuhan PDB.

#### **Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)**

IHSG merupakan indeks gabungan dari seluruh jenis saham yang tercatat di bursa efek. Indeks ini diterbitkan oleh bursa efek. Berikut data perkembangan IHSG kuartalan selama periode 2005 sampai dengan 2009.

**Tabel 5. Perkembangan Indeks Harga Saham Gabungan**

Periode/ Tahun	2005	2006	2007	2008	2009
Q1	1.080	2.323	1.831	2.447	1.407
Q2	1.122	1.310	2.139	2.349	2.027
Q3	1.079	1.535	2.359	1.833	2.468
Q4	1.163	1.806	2.746	1.355	2.534

Sumber: Bapepam, Bank Indonesia

Tabel 5 menunjukkan bahwa perkembangan indeks harga saham gabungan (IHSG) dari tahun 2005 sampai dengan 2009 secara rata-rata mengalami fluktuatif yang cukup signifikan namun secara umum angka indeks mengalami peningkatan. Dilihat dari sudut pandang dinamika investasi di pasar modal,

peningkatan angka indeks memberikan indikasi bahwa iklim investasi jangka panjang bagi pihak investor cukup baik.

#### **Hipotesis**

Hasil statistik pada Tabel 6 memperlihatkan bahwa hanya variabel NPF sebagai determinasi *financing to*

*deposit ratio*. Penulis menduga keterbatasan data atau pendeknya rentang waktu menyebabkan estimasi model tidak begitu baik, faktor lain bisa saja variabel SBIS, PDB dan IHSG tidak berpengaruh langsung terhadap *financing to deposit ratio*. FDR

merupakan penyaluran dana ke masyarakat sehingga katanlah kenaikan IHG dan PDB atau SBIS belum tentu ada dampak pada aktivitas ekonomi secara langsung yang berujung pada pembiayaan dampak dari aktivitas ekonomi masyarakat.

**Tabel 6. Uji Hepotesis**

Model	T	Sig.
1 (Constant)	-1.147	.269
NPF	2.303	.036
SBIS	-.501	.624
PDB	.453	.657
IHSG	-.122	.905

a. Dependent Variable: FDR

Koefisien determinasi sebesar 0,467 menunjukkan bahwa korelasi atau hubungan antara *financing to deposit ratio* dengan Non Performing Finance (NPF), Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS), Pendapatan Domestik Bruto (PDB) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)

adalah tidak terlalu lemah karena angka tersebut masih dibawah 0,5. Ke empat variabel dalam model tersebut adalah signifikan jika di uji secara bersama, artinya ke empat variabel tersebut merupakan determinan dari FDR (lihat Tabel 7).

**Tabel 7. Uji F dan Koefisien Determinasi**

Model	R	R Square	F	Sig.
1	.683 <sup>a</sup>	.467	3.288	.040 <sup>a</sup>

a. Predictors: (Constant), IHSG, NPF, SBIS, PDB

b. Dependent Variable: FDR

## SIMPULAN DAN SARAN

Salah satu indikator yang dapat memperlihatkan fungsi intermediasi perbankan syariah tersebut adalah rasio pembiayaan yang disalurkan terhadap dana pihak ketiga yang diterima atau bisa diistilahkan dengan *financing to deposit ratio* (FDR). Alat uji yang digunakan dalam penelitian ini adalah uji regresi linier berganda. Setelah melakukan beberapa serangkaian pengujian secara empiris, maka terdapat beberapa hasil kesimpulan bahwa

secara bersama-sama variabel faktor NPF, SBIS, PDB, dan IHSG berpengaruh signifikan dengan FDR. Uji secara parsial hanya variabel NPF mempunyai pengaruh signifikan terhadap FDR. Ada dugaan ke tiga variabel lain tidak signifikan dikarenakan masih terbatasnya time series data penelitian atau bisa juga dikarenakan ke tiga variabel tersebut bukan merupakan pengaruh langsung ke FDR. Keterbatasan ini bisa menjadi topik penelitian selanjutnya.

## DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, Piter, dan Suseno. (2003).

Fungsi Intermediasi Perbankan di Daerah : Pengukuran dan Identifikasi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, 3(4).

Edward W. Reed, and Edward K. Gill. (1989). *Commercial Bank*, Fawith Editia, New Jersey: Prentice Hall Inc.

Hassan, L. H. (2004). Perbandingan Peranan Jalur Kredit Pada Masa Sebelum dan Ketika Krisis Ekonomi. *Perbandingan Peranan Jalur Kredit*, 36.

Rahman (2003). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Fungsi Intermediasi Perbankan di Indonesia Tahun 1998-2002. *Tesis*. Yogyakarta. Program Magister

Manajemen Universitas Islam Indonesia.

Bank Indonesia. Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Retrieved from [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Bank Indonesia. Statistik Perbankan Syariah, Retrieved from [www.bi.go.id](http://www.bi.go.id)

Badan Pusat Statistik. Produk Domestik Bruto, Retrieved from [www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)